



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD YASIN**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **654557**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.625.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/132 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/97 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/68 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/138 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 569 m2/250 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, WARISAN Rp. 380.000.000
6. Tanah Seluas 4898 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, WARISAN Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 460.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. MOTOR, VESPA PRIMAVERA 150 ABS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 207.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.930.704.839
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.222.704.839
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.222.704.839

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.